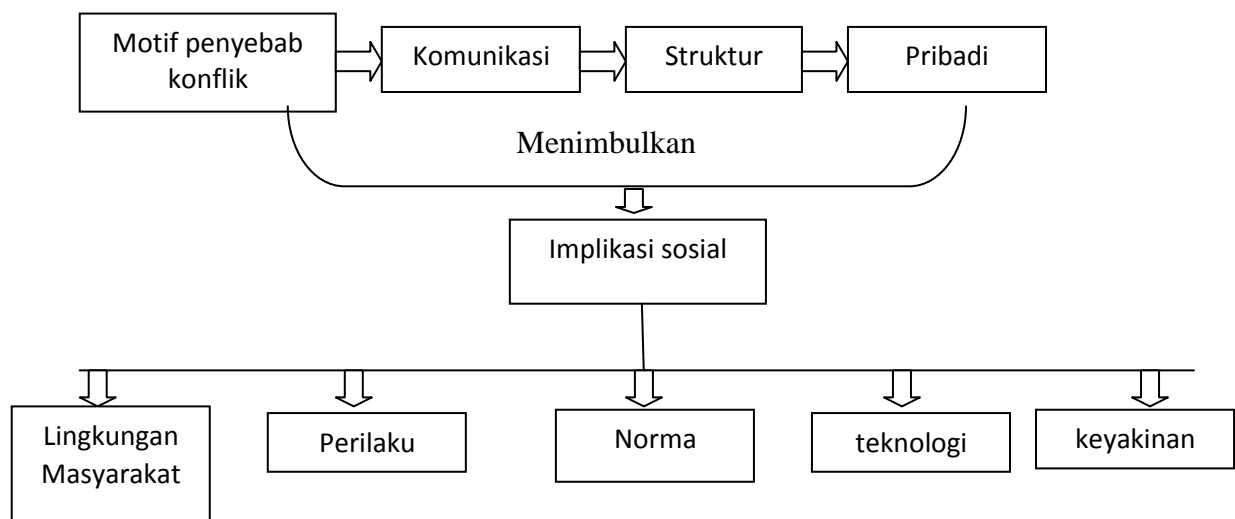


### BAB III

#### PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil analisis yang diperoleh dari hasil penelitian mengenai motif terjadinya pembelahan ideologi politik pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 dan implikasi sosialnya. Alat ukur yang digunakan adalah terdiri motif penyebab konflik dan implikasi sosial. Peneliti akan membahas mengenai motif penyebab konflik antara lain: dari motif komunikasi, motif struktur, motif individu. Lalu peneliti akan membahas mengenai implikasi sosial terhadap masyarakat antara lain: lingkungan masyarakat, perilaku, norma, teknologi, dan keyakinan. Terakhir peneliti akan menyimpulkan hasil analisis dari data yang telah dipaparkan.

**Bagan. 3.1. Alur logika**



Pembelahan ideologi politik pada Pilkada DKI Jakarta 2017 disebabkan adanya motif penyebab konflik yang menimbulkan implikasi

sosial di masyarakat Jakarta. Awal mula terjadinya pembelahan ideologi politik pada Pilkada DKI Jakarta 2017 dikarenakan adanya komunikasi buruk yang dilakukan oleh salah calon gubernur DKI Jakarta, lalu adanya konflik Struktur (kelompok – Kelompok organisasi) yang juga menjadi pendukung terjadinya pembelahan ideologi, dan konflik pribadi ini juga menyebabkan terjadinya konflik dan mendukung terjadinya pembelahan ideologi politik pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Dengan adanya konflik yang disebabkan oleh komunikasi, struktur, dan pribadi ini juga menimbulkan implikasi sosial di masyarakat Jakarta seperti , perubahan lingkungan, perilaku, norma, teknologi, dan makin kuatnya statmen agama dalam Pilgub DKI Jakarta 2017.

## **A. Motif Penyebab Konflik**

### **1. Komunikasi**

Komunikasi sangat penting bagi seorang pemimpin baik pemimpin daerah maupun pemimpin negara. Komunikasi juga sangat erat kaitannya dengan penilaian seseorang terhadap orang lain. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik seorang pemimpin dapat dengan mudah mempengaruhi partisipasi masyarakat untuk memilih dirinya, sebaliknya jika seorang pemimpin memiliki komunikasi yang buruk maka masyarakat juga tidak akan terpengaruh dengan apa yang telah ia ucapkan.

Pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu salah satu calon gubernur dianggap telah berkomunikasi buruk kepada masyarakat. Perkataan yang ia lontarkan saat itu dianggap tidak sesuai dengan cara berkomunikasi

seorang pemimpin yang baik. Bahkan masyarakat menilai dengan cara ia berbicara seperti itu dapat membuat sakit hati banyak orang dan dengan cara perkataannya seperti itu dapat menimbulkan perpecahan di kalangan umat Muslim hingga menimbulkan perpecahan ideologi.

Salah satu calon gubernur itu ialah Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Ahok sendiri dinilai memiliki gaya komunikasi yang buruk ia juga dianggap telah menistakan agama. Ahok di dianggap telah menistakan agama karena pidatonya di Kepulauan Seribu terkait surat Al- Maidah ayat 51. Saat itu Ahok berpidato dihadapan masyarakat Kepulauan Seribu, Ahok menghimbau kepada masyarakat untuk memilih pemimpin sesuai dengan hati nurani dan menyinggung agar masyarakat jangan mau dibohongi pakai surat Al – Maidah ayat 51. Isi penggalan pidato Ahok yang menyinggung surah Al- Maidah ayat 51 :

*“Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil Bapak-Ibu nggak bisa pilih saya ya kan? Dibohongi pakai Surat Al-Maidah 51, macam-macam itu. Itu hak Bapak-Ibu ya. Jadi kalau Bapak-Ibu perasaan nggak bisa kepilih nih, karena saya takut masuk neraka karena dibodohin gitu ya, nggak apa-apa,” begitu penggalan pernyataan Ahok yang dibacakan ulang (detiknews.com, 09 Mei 2017).*

Pidato Ahok yang mengutip surah Al- Maidah ayat 51 di Kepulan Seribu kini menjadi kontroversi di tiap kalangan, baik di kalangan masyarakat hingga di kalangan tokoh – tokoh agama. Kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok tersebut juga menimbulkan terjadinya pembelahan ideologi politik pada tokoh – tokoh agama dan elit politik yang ada. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidak pernah merasa telah menghina ayat suci Al – Quran. Ahok mengatakan

video berisikan ucapannya yang menyebutkan surat Al – Maidah ayat 51 saat kunjungan kerja di Kepulauan Seribu telah disalahgunakan oleh beberapa orang. Menurut Ahok video saat ia berbicara di kepulauan seribu itu telah dipotong dan tidak ditampilkan secara utuh (Asriandi, 2016:60).

Dari kasus dugaan penistaan agama yang menyeret Ahok tersebut menimbulkan berbagai macam pro dan kontra di masyarakat, pemerintah ataupun para tokoh agama. Ada pihak yang menganggap bahwa Ahok tidak melakukan penistaan agama, bahkan ada juga pihak yang berpendapat bahwa Ahok memang bersalah karena telah menistakan agama dan menyakiti banyak hati orang Muslim.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan Addin Khaerunnisa Juswil sebagai warga Jakarta Timur (Mahasiswa), menyatakan bahwa:

*“Bagi saya, pernyataan Ahok bukanlah sebuah penistaan agama, tetapi hanya bentuk peringatan atas apa yang sering dilakukan oleh politisi – politisi di massa kampanye”* (hasil wawancara Addin Khaerunnisa Juswil, 3 Januari 2019).

Menurut penjelasan di atas Ahok bukanlah seorang penista agama yang dikatakan banyak orang. Hanya saja ada faktor politik didalamnya agar masyarakat percaya bahwa Ahok ialah seorang penista agama. Pidato yang disampaikan Ahok terkait surat Al – Maidah itu juga hanya sebagai pengingat atas politisi yang sering membawa agama ke dalam ranah politik. Dalam pidato tersebut juga Ahok tidak ada memaksa masyarakat untuk memilih dirinya hanya saja ia berbicara kalau pemimpin tidak harus Islam. Pidato Ahok di Kepulauan Seribu yang mengutip surat Al –Maidah

ayat 51 tidak ada unsur menodai atau menistakan agama, hanya saja ada permainan politik dan ada segelintir kelompok yang tidak menyukai Ahok yang membuat pembodohan agar Ahok dibenci oleh umat Islam dan agar Ahok kalah dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta. Masyarakat hanya dipropokasi oleh kepentingan politik dan kelompok Islam garis keras agar menjatuhkan Ahok.

Perkataan yang Ahok ucapkan saat berpidato di Kepulauan Seribu saat itu memang membuat kontroversi yang begitu panas diperpolitikan ini, dari segelintir tokoh mengatakan bahwa tidak ada unsur mengolok – olok agama hingga melecehkan ayat suci Al – Quran bahkan pidato yang ia sampaikan tersebut tidak sampai menjadikan ia sebagai seorang penista agama. Menurut Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil untuk Konstitusi (AMSİK) menganggap calon Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, tak berniat menistakan agama. Mereka pun menganggap ada sekelompok elite politik dan organisasi Islam garis keras yang memprovokasi kasus dugaan penistaan Surat Al-Maidah ayat 51 tersebut. (tempo.com, 10 Desember 2016).

Sama halnya yang telah dikatakan oleh Imam besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar ia berpendapat bahwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bukanlah seorang penista agama seperti yang dikatakan saat ini. Mencuatnya kasus Ahok yang telah dituduh sebagai seorang penista agama ini membuat tokoh agama memberikan pendapatnya dengan apa yang ia lihat di berbagai media – media masa. Apa yang Ahok sampaikan saat

berpidato di Kepulauan Seribu sama sekali tidak mencerminkan sebagai seorang penista agama, yang mana perkataan Ahok saat itu hanya ingin mengingatkan masyarakat bahwa ia tidak memaksa masyarakat untuk memilih dirinya dengan menggunakan surat Al – Maidah ayat 51 tersebut. segelintir masyarakat hingga tokoh yang menilai Ahok sebagai seorang penista agama itu hanya kesalahpahaman karena ia telah membawa ayat suci ke dalam pidatonya dan menggunakan kata dibohongi oleh surat Al – Maidah, beberapa orang hanya salah dalam memaknai isi pidato tersebut (kbr.id. 01 November 2016).

Namun berbeda dengan pendapat dari M. Nizzar sebagai warga Jakarta Selatan (Mahasiswa), ia mengatakan bahwa:

*“Pada dasarnya perkataan yang disampaikan oleh Ahok di kepulauan Seribu memang murni salah, karena dengan cara berkomunikasi seperti itu hanya menimbulkan perpecahan saja”* (hasil wawancara M.Nizzar 03 Januari 2019).

Dari penjelasan di atas bahwa penistaan agama yang dilakukan Ahok sendiri murni sebagai penista agama karena ia telah menterjemahkan ayat tersebut hanya dengan pemahaman ia saja tidak sesuai dengan pemahaman agama Islam. Seorang pemimpin yang baik seharusnya mengerti mengenai keanekaragaman agama yang ada agar tidak ada perpecahan diantar masyarakat. Seorang pemimpin yang baik juga harus memiliki Ahlak yang baik tidak hanya asal ucap karena perkataan itu adalah hal terpenting bagi seorang pemimpin. Dari permasalahan buruknya komunikasi yang telah dilakukan Ahok membawa dampak

buruk bagi masyarakat Jakarta hingga terjadinya perpecahan di masyarakat hingga tokoh – tokoh penting lainnya.

Kasus yang saat ini di terjadi kepada Ahok sendiri memang kesalahan cara berkomunikasi saat menyampaikan pidato di Kepulauan Seribu. Pidato yang dilakukannya memang tidak salah akan tetapi isi dari pidato tersebut yang mengutip surat Al – Maidahlah yang menjadi masalah besar bagi umat Muslim. Sama halnya yang dikatakan oleh seorang Cendekiawan Muslim Ulil Abdalla dan seorang peneliti LIPI Siti Zuhro, mengatakan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Ahok adalah komunikasi terburuk yang pernah dilakukan oleh seorang pemimpin. Komunikasi saat berpidatonya saat itu memang membuat banyak masyarakat Jakarta bahkan tokoh agama merasa tersinggung dan sakit hati atas perkataannya yang membawa – bawa ayat suci Al – Quran dalam berpidatonya. Dengan mencuatnya kasus tersebut menyebabkan terpecah belahnya persatuan umat (masyarakat Jakarta) dan menimbulkan konflik berkepanjangan hingga masa yang akan datang. Adapun kesalahan yang telah ia lakukan dapat merugikan dirinya sendiri dalam pertarungan Pilkada DKI Jakarta 2017 (Tirto.id, 18 Oktober 2016).

Ketua Umum Dewan pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fornt Pembela Islam (FPI) juga mengatakan bahwa pidato Ahok saat di kepulauan Seribu memang salah dan berkonteks telah menghina Al – Quran dan dari perkataan Ahok tersebut juga telah menghina Ulama yang memiliki koneksi hukum. Perkataan Ahok saat di kepulauan Seribu tersebut juga nilai tidak etis karena Ahok sendiri bukanlah berasal dari

kalangan seorang Muslim. Jelas dikatakan bahwa umat Islam tidak boleh memilih pemimpin yang tidak seagama. Didalam surat Al – Maidah ayat 51 – 52 juga mengatakan jangan menjadikan orang Yahudi dan Kristen sebagai “wali” yang artinya “pelindung”, di Al – Quran telah Allah berfirman dalam surat al –maidah ayat 51 – 52 (detiknews.com, 11 Oktober 2016).

Jelas dikatakan pada surat Al – Maidah ayat 51 – 52 bahwa umat yang beragama Islam harus memilih pemimpin yang seiman atau seagama. Sama Umat Muslim telah dilarang keras oleh Allah untuk menjadikan non – Muslim sebagai pemimpin dari kalangan apapun non – Muslim itu. Kalau saja umat Muslim tidak mengikuti perintah yang telah ditetapkan Allah maka mereka termasuk golongan seperti mereka. Terkecuali jika umat Muslim berada dikondisi yang sangat darurat untuk bersiyasat, contohnya saja di negara minoritas Muslim umat beragama Muslim boleh memilih pemimpin non – Muslim. Sama halnya yang terjadi di Pilkada DKI Jakarta 2017, Pilkada DKI Jakarta lalu ramai diperbincangkan larangan tidak diperbolehkan memilih pemimpin non – Muslim di karenakan masyarakat Jakarta mayoritas penduduknya adalah Islam dan ramai pula diperbincangkan masalah adanya penistaan agama yang telah dilakukan oleh Ahok yang mana ia adalah seorang non – Muslim yang akan melaju ke Pilkada menjadi gubernur DKI Jakarta 2017.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa buruknya komunikasi inilah penyebab awal terjadinya konflik di masyarakat dan awal terjadinya pembelahan ideologi politik. Masalah ini pun telah membuat panasnya



perpolitikan jelang Pilkada DKI Jakarta 2017. Buruknya komunikasi yang telah dilakukan Ahok ini pun berdampak terhadap perpecahan disetiap kalangan masyarakat hingga tokoh – tokoh penting lainnya. Buruknya komunikasi yang ia lakukan pun akan merugikan dirinya sendiri dan dapat menurunkan elektabilitasnya di Pilgub DKI Jakarta. Berbeda dengan komunikasi Anies yang mana saat berkomunikasi ia tidak menyertakan ayat suci didalamnya dan komunikasi Anies sendiri menggunakan kata – kata lemah lembut untuk menarik perhatian masyarakat Jakarta.

## **2. Struktur**

Kelompok - kelompok organisasi yang mengangkat kasus penistaan agama yang dilakukan oleh calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) lalu ialah kelompok ormas Front Pembela Islam (FPI) dan Forum Umat Islam (FUI). FPI banyak diberitakan oleh media sosial bahwa mereka adalah ormas yang sering berbuat anarkisme dan intoleran. FPI juga banyak mendapatkan citra buruk di masyarakat (Pradipta., Hidayah., Haya., Ervania & Kristanto, 2018: 12). Front Pembela Islam (FPI) sendiri menjejal atau menolak Ahok untuk melanjutkan pencalonannya menjadi Gubernur DKI Jakarta, karena Ahok dianggap tidak pantas menjadi pemimpin karena telah menistakan atau menodai agama.

Front Pembela Islam (FPI) melakukan demo berawal dari tuduhan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat ia mengadakan kunjungan kerja

di Kepulauan Seribu yang isi pidatonya ada mengutip surat Al- Maidah ayat 51, sebagaimana kutipannya berikut :

*“Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil Bapak-Ibu nggak bisa pilih saya ya kan? Dibohongi pakai Surat Al-Maidah 51, macam-macam itu. Itu hak Bapak-Ibu ya. Jadi kalau Bapak-Ibu perasaan nggak bisa kepilih nih, karena saya takut masuk neraka karena dibodohin gitu ya, nggak apa-apa,” begitu penggalan pernyataan Ahok yang dibacakan ulang (detiknews.com, 09 Mei 2017).*

Rupanya pidato yang disampaikan Ahok menuai polemik yang sangat besar, sehingga semua media Online menyebarkan video tersebut melalui media sosial. Dari pidato yang telah disampaikan Ahok terkait surat Al – Maidah ayat 51, ternyata menjadi perhatian Buni Yani lantas ia mengunggah video rekaman pidato Ahok di *Facebooknya* menjadi viral di media sosial sehingga banyak menyita perhatian publik. Tidak lama berselang video tersebut viral Front Pembela Islam (FPI) dan majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan video Ahok telah menyinggung surah Al – Maidah 51 saat di Kepulauan Seribu adalah penistaan agama dan ucapan Ahok memiliki koneksi hukum. Setelah FPI dan MUI menyatakan bahwa Ahok telah menistakan agama, mereka membuat laporannya ke pihak berwajib dan akan mengadakan aksi demo.

Ketua umum FPI Muhammad Rizieq Syihab, mengatakan bahwa FPI siap menjadi barisan terdepan untuk meminta kepolisian agar mengusut tuntas kasus tersebut. Pada tanggal 14 Oktober 2016 lalu mereka menggelar demo di depan Balai Kota DKI Jakarta. Mereka merasa bahwa demo yang telah digelar hari itu tidak ada respons sama sekali sehingga

mereka akan menggelar aksi demo untuk kedua kalinya atau diberi nama “*Demo Bela Islam Jilid II*” yang akan digelar pada tanggal 4 November 2016 lalu. Saat demo kedua digelar banyak masyarakat yang ikut berpartisipasi sehingga memenuhi jalan protokol di pusat pemerintahan, seperti dipenuhi lautan manusia. Pada saat demo kali ini dilakukan, para pengunjung rasa menuntut agar dapat bertemu dengan presiden Republik Indonesia, Joko Widodo agar presiden tidak menyulitkan penyelidikan kasus tersebut (merdeka.com, 30 Desember 2017).

Setelah demo kedua selesai dilaksanakan status Ahok ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri. Polemik Kasus yang menyeret Gubernur non – aktif itu tidak hanya sampai di situ, setelah ia ditetapkan sebagai tersangka sejumlah kalangan masyarakat yang mengatasnamakan Gerakan Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF – MUI) mendesak Polri untuk kasus Ahok segera disidangkan. Aksi – aksi tersebut berlanjut hingga aksi jilid III atau yang diberinama “aksi 212” yang diselenggarakan tanggal 02 Desember 2017 lalu. Aksi 212 ini adalah aksi terbesar selama diselenggarakannya aksi demo tersebut, jumlah peserta yang ikut dalam aksi itu mencapai ratusan ribu massa. Akan tetapi pada saat aksi 212 ini FPI, GNPE – MUI dan MUI tidak ikut melakukan aksi karena mereka beralasan bahwa yang memiliki inisiatif melakukan aksi tersebut dominan umat Islam yang membela ulama dan agamanya. Aksi 212 diikuti simpati dari organisasi Forum Umat Islam (FUI) dan Mahasiswa (merdeka.com, 30 Desember 2017).

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti melalui wawancara dengan informan Maria sebagai warga Jakarta (mahasiswi), mengatakan bahwa:

*“ Bahwa umat Islam melakukan aksi – aksi ini hanya untuk menuntut keadilan, yang mana aksi ini dilakukan murni karena umat Islam merasa sakit hati dan kecewa atas ucapan Ahok di Kepulauan Seribu. (hasil wawancara Maria 06 Januari 2019).*

Dari penjelasan di atas umat Islam melakukan aksi – aksi demo ini karena murni ingin membela agama Islam dari orang – orang yang menyalahgunakan agama. Didalam aksi yang dilakukan tidak ada unsur politik didalamnya dan tidak ada kepentingan didalamnya. Dalam aksi ini pun tidak ada niat untuk mempengaruhi masyarakat untuk membenci calon gubernur DKI Jakarta tersebut. Aksi ini dilakukan karena memang perkataan Ahok saat itu salah dan telah melukai banyak hati umat Islam dan membuat kekecewaan di kalangan umat Muslim.

Kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok ini pun menimbulkan amarah dikalangan umat Muslim, hingga mereka menggelar aksi – aksi demo yang hanya ingin menuntut keadilan dari pemerintah. Aksi demo penuntutan Ahok sebagai seorang penista agama ini pun diikuti ratusan ribu masa yang akan menuntut hak dan keadilan umat Muslim. Dalam aksi tersebut massa yang mengikuti tidak ada yang bertindak anarkis hanya saja didalam aksi demo yang dilakukan menuntut agar gubernur DKI Jakarta dicopot dari jabatannya dan mempertanggungjawabkan kesalahannya yang telah dilakukan kepada umat Islam. Aksi ini pun meminta agar tidak ada lagi kriminalitas terhadap ulama – ulama yang ada. Muhammad Al

Khathah sekretariat Jedral Forum Umat Islam (FUI) mengatakan bahwa aksi demo yang dilakukan hanyalah sebagai monumen ketakwaan umat Islam dalam menjunjung sebuah perjuangan untuk menegakan agama dari penistaan, aksi ini pun dilakukan benar – benar murni bentuk kekecewaan umat Islam. Aksi yang digelar di Monas ini banyak menyedot perhatian dari berbagai kalangan bukan hanya umat muslim (bbc.com, 21 Februari 2017).

Namun berbeda dengan pendapat dari Feyzars Ma'ruf sebagai warga Jakarta Selatan (Mahasiswa), ia mengatakan bahwa:

*“ Dengan adanya aksi tersebut Indonesia menjadi intoleransi Bhineka Tunggal Ika dan membuat perpecahan bahkan mindset ulama zaman sekarang sering dikriminalisasi ”* (wawancara Feyzars Ma'ruf, 3 Januari 2019).

Dari penjelasan di atas aksi – aksi demo yang dilakukan oleh segelintir kelompok – kelompok Islam hanya membuat Indonesia krisis intoleransi beragama. Aksi – kasi yang dilakukan tersebut juga hanya membuat konflik di masyarakat seperti halnya konflik antar masyarakat, tidak hanya masyarakat konflik tersebut juga dapat membuat terpecah belahnya tokoh – tokoh agama yang ada. Aksi – aksi ini dilakukan hanya sebagai alat politik yang di selimuti silaturahmi umat Muslim. Aksi – aksi ini pun dianggap hanya menyebabkan kemacetan di jalan saja.

Aksi – aksi demo 212 yang menyeret Ahok sebagai seorang penista agama saat Pilgub DKI Jakarta 2017 menjadi perbincangan panas di kalangan masyarakat, pemerintah hingga tokoh – tokoh agama. Aksi 212 ini dikatakan oleh segelintir orang memiliki tujuan ke arah

politik. Aksi ini pun mendapat perhatian dari MUI Jawa Barat Wiranto mengatakan kegiatan aksi 212 ini tidak murni lagi sebagai kegiatan keagamaan akan tetapi aksi tersebut telah melenceng dari tujuan awal. Kegiatan ini pun awalnya hanya untuk menuntut Ahok agar ditindaklanjuti ke ranah hukum karena dirasa perkataan Ahok banyak meresahkan Umat Islam. (tribunnews.com, 29 November 2018). Sama halnya seperti yang dikatakan oleh Ketua Umum MUI Ma'aruf Amin mengatakan yang mana aksi 212 dilakukan bersifat politisi, aksi tersebut telah melenceng ke arah perpolitikan bukan lagi murni atas membela agama Islam. Dengan aksi yang telah melenceng dari arahnya ini Ma'aruf Amin tidak ingin diikut campurkan oleh masalah yang telah menyeret Ahok. Aksi yang dilakukan saat itu juga ada kaitannya dengan fatwa MUI yang menyatakan bahwa Ahok adalah seorang penista agama (detiknews.com 20 Februari 2017)

Dapat ditarik kesimpulan, kelompok – kelompok kepentingan atau ormas – ormas seperti FPI, MUI dan GNPF – MUI ini melakukan aksi – aksi demo seperti itu hanya ingin meminta hak dan keadilan dari pemerintah atas apa yang telah diperbuat oleh Ahok. Aksi ini pun menimbulkan pro dan kontra di masyarakat hingga tokoh –tokoh agama. Aksi yang dilakukan oleh Ormas atau kelompok kepentingan ini telah didasarkan oleh fakta yang menyatakan bahwa Ahok bersalah karena pidatonya di kepulauan seribu tersebut telah mengutip ayat suci Al-Quran. Aksi ini pun dilakukan karena adanya Fatwa dari MUI yang mengatakan bahwa Ahok memang seorang penista agama yang mana

Ahok telah menyakiti hati umat Muslim. Aksi ini pun didasarkan karena buruknya komunikasi Ahok saat berpidato. Aksi ini pun tidak ada unsur mempengaruhi masyarakat untuk membenci Ahok. Aksi ini telah murni dilakukan untuk membela hak Islam.

### **3. Pribadi (individu)**

Konflik individu yang terjadi di Pilkada 2017 lalu membuat banyak kekacauan politik yang menimbulkan perpecahan ideologi di kalangan ulama dan elit politik, konflik individu tersebut ialah konflik antara dosen suwasta Buni Yani dan calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Konflik Pilkada 2017 lalu menuai masalah dalam masyarakat hingga menyeret tokoh – tokoh penting Indonesia. Konflik itu pun membawa dampak buruk terhadap wajah Pilgub DKI Jakarta 2017 hingga beredarnya isu – isu SARA dan berita – berita Hoax yang terjadi di rezim sekarang.

Namun beredarnya video pidato Ahok untuk pertama kali bukanlah Buni Yani yang mengunggahnya akan tetapi awal mula munculnya video tersebut berasal dari unggahan *website* Pemerintah Prov DKI Jakarta ([okezone.com](http://okezone.com), 07 November 2016). Sebagaimana diketahui video pidato Ahok di Kepulauan Seribu menimbulkan polemik dan di anggap telah menistakan agama karena ia telah menggunakan ayat suci Al – Quran didalamnya. Video itu pun menjadi viral sehingga berbagai ormas Islam tidak terima dengan ucapan yang dikatakan Ahok tersebut ([okezone.com](http://okezone.com), 07 November 2016).

Kesalahan yang telah dilakukan oleh Buni Yani ini dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan di antara umat Islam. Permasalahan ini pun bermula dari pemotongan video pidato Ahok yang menyelipkan surat Al – Maidah ayat 51 di Kepulauan Seribu yang mana Buni Yani telah mengedit video Ahok yang awal durasinya mencapai 1 Jam lebih menjadi hanya beberapa detik saja dan ia mengunggah video tersebut ke *Facebook* pribadinya. Tak luput ia menghilangkan kata “*pakai*” dan memberi judul dengan caption “ *penistaan terhadap agama*” (bbc.com, 13 Juni 2017).

Setelah Buni Yani mengunggah Video tersebut ke Facebook miliknya muncullah berbagai statement dari masyarakat. Video yang ia unggah bermuat konten SARA dan dituding menebarkan kebencian. Sama halnya yang telah dikatakan oleh kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya Kombes Agus Rohmat yang mana unggahan Buni Yani terkait video pidato Ahok, ia mengatakan bahwa :

*“Bukan masalah video asli atau rekayasa, dengan di unggahnya video ke akun facebooknya Buni Yani dapat menimbulkan konflik di masyarakat yang dapat dilihat pada pelaksanaan sebelum di upload oleh Buni Yani tidak ada masalah sebelumnya”* (liputan6.com, 14 Desember 2016).

Dari penjelasan di atas mengatakan dari unggahan Video Buni Yani di halaman *facebooknya* yang kemudian viral tersebut dapat memicu kontroversi di berbagai kalangan. Video yang tengah viral ini juga menjadi penyebab konflik yang sangat panas di kalangan masyarakat dengan viralnya video ini akan berdampak kepada Pilkada DKI Jakarta



yang tengah di selenggarakan. Video yang telah diunggah ini akan menimbulkan rasa benci antar masyarakat.

Penyebaran video yang telah dilakukan Buni Yani ini juga telah melanggar Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pasal 28 ayat 2 Dimana Buni Yani telah menyebar luaskan video yang membuat kemarahan buplik. Video yang telah disebar oleh Buni Yani ini pun tidak sesuai dengan kenyataan yang ada (Hoax) dari berita hoax ini akan menimbulkan konflik atau kebencian disetiap kalangan masyarakat ataupun permusuhan antara masyarakat. Video pidato Ahok di Kepulauan Seribu ini pun telah dipotong durasinya dan ditambahkan dengan judul yang dapat membuat rasa marah masyarakat (liputan6.com, 13 Juni 2017).

Walaupun Buni Yani telah dinyatakan bersalah karena telah menyebarkan berita yang berujung kebencian. Ia pun tetap bersih kukuh merasa tidak bersalah. Ia menyampaikan mubahalahnya:

*"Demi Allah saya tidak pernah mengedit dan memotong video. Kalau saya bohong, biarlah Allah sekarang juga memberikan laknat dan azab kepada saya dan seterusnya kepada anak cucu saya dan saya dimasukkan selama-lamanya ke dalam neraka. Selama-lamanya ke dalam neraka agar saya dikutuk selama-lamanya dan anak cucu saya merasakan yang sepedih-pedihnya azab dari Allah"* (detiknews.com, 30 November 2018).

Dari penjelasan di atas bahwa ia tidak merasa telah memotong video pidato Ahok di Kepulauan Seribu tersebut. Ia pun merasa dirinya tidak salah dalam kasus ini hanya saja ia telah didiskriminalisasi. Akan tetapi dari pernyataan Buni Yani tersebut ia tetap dinyatakan bersalah

karena iya telah menyebarkan video pidato Ahok tersebut tanpa mengantongi izin dari pemilik video yang pertama kali mengunggahnya. Bahkan uploadan videonya ini akan menimbulkan perpecahan di masyarakat, karena kesalahan yang ia lakukan ini memicu kebencian diantara masyarakat, menurut Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya Kombes Agus Rohmat yang dilansir oleh liputan6.com (14 Desember 2016), bahwa unggahannya di facebook mengakibatkan kebencian di kalangan umat Islam. Walaupun Buni Yani mengatakan ia tidak merasa bersalah atas kasus ini, akan tetapi ia telah terjerat UU ITE pasal 28 ayat 2, yang mana ia dengan sengaja menyebar luaskan video tanpa seizin pemilik video aslinya.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa, indikator pribadi ini juga menimbulkan konflik pada saat Pilkada DKI Jakarta 2017, karena video yang telah diunggah Buni Yani ke akun halaman *Facebooknya* ini terbukti bersalah karena siapapun yang mengambil video orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya akan terjerat UU ITE pasal 28 ayat 2. Walaupun maksud Buni Yani mengunggah video tersebut tidak ada unsur kebencian. Akan tetapi tindakan yang telah dilakukannya menimbulkan kebencian dan amarah publik. Kasus ini pun dapat memunculkan pembelahan ideologi politik pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Kasus ini pun mendapatkan perhatian begitu besar baik dari media nasional hingga media internasional. Kasus ini pun membuat dirinya di vonis penjara oleh penegak hukum.

Dapat ditarik kesimpulan keseluruhan, dari ketiga indikator di atas yang memicu awal terjadinya pembelahan ideologi pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu ialah indikator komunikasi, lalu indikator Pribadi, dan indikator struktur. Indikator komunikasi, didalam indikator komunikasi ini ialah awal muncul terjadi pembelahan ideologi politik pada Pilkada DKI, karena pada indikator ini salah satu calon gubernur telah membuat kesalahan yang cukup besar dalam berkomunikasi dihadapkan publik. Salah satu gubernur tersebut ialah Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), kesalahan yang ia lakukan pada saat itu melakukan pidato di Kepulauan Seribu yang didalamnya mengutip Surah Al- Maidah ayat 51. Masalahnya juga ia menyebutkan didalam pidatonya jangan mau dibohongi oleh surat Al - Maidah tersebut, sontak umat Muslim merasa sakit hati atas ucapannya tersebut dan menimbulkan keluarnya Fatwa dari MUI.

Indikator pribadi ini juga menjadi salah satu faktor terjadinya konflik dan pembelahan ideologi pada saat Pilkada DKI Jakarta 2017, karena didalam indikator pribadi ini terdapat adanya penyebaran pidato Ahok saat di Kepulauan Seribu oleh dosen Swasta yaitu Buni Yani. Yang mana Buni Yani telah menggunggah ulang rekaman video Ahok dan menuliskan Judul di halaman Facebooknya dengan kata “pakai” dan memberikan judul “ penistaan terhadap agama”. Sontak uploadan Buni Yani ini menjadi viral dan menimbulkan konflik pada saat Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu berlangsung. Lalu, indikator struktur ini pun juga menjadi penyebab kekacauan Pilkada DKI Jakarta 2017, karena banyak ormas – ormas atau kelompok – kelompok Islam melakukan aksi

penuntutan terhadap Calon Gubernur DKI Jakarta ( Ahok), yang mana ia telah dikatakan sebagai seorang penista agama. Aksi – aksi ini pun membuat terpecah belahnya masyarakat dan para tokoh – tokoh pada saat Pilkada DKI Jakarta 2017.

## **B. Implikasi Perubahan Sosial**

### **1. Lingkungan Masyarakat**

#### **a. Tim Sukses Ahok – Djarot**

Setiap proses Pilkada yang ada pasti didalamnya ada tim sukses yang menjadi sayap untuk memenangkan pasangan calon kandidat tersebut. Tim sukses ini juga berfungsi untuk membantu berhasilnya proses Pilkada yang dijalani oleh pasangan kandidat tersebut. Tim sukses ini juga sangat membantu dalam mencari partisipasi dari masyarakat agar mau memilih calon kandidat yang telah diusungnya. Keberhasilan seorang calon kandidat pasti di belakangnya ada tim sukses yang berhasil menaikkan elektabilitas calon pasangan tersebut.

Pada persaingan Pilgub DKI Jakarta 2017 setiap pasangan calon gubernur pasti memiliki tim suksesnya masing – masing yang mana tim sukses ini dapat membantu dalam memenangkan calon kandidatnya dan tim sukses ini pun memiliki strategi – strategi yang dapat mempengaruhi masyarakat untuk memilih calon kandidat yang telah diusungnya. Sama halnya tim sukses Ahok – Djarot ini pun memiliki strategi untuk menarik hati masyarakat Jakarta agar memperoleh suara partisipasi sebanyak –

banyaknya. Tim sukses yang mendukung Ahok – Djarot ini pun bukan hanya dari kalangan partai politik saja akan tetapi kalangan artis – artis ibu kota pun ikut menjadi tim sukses dalam memenangkan calon kandidat ini. Pengaruh yang dihasilkan dari artis yang ikut memilih calon pasangan ini menuai hasil yang sangat baik dalam menaikkan partisipasi (kompas.com, 20 November 2016).

Untuk memperoleh partisipasi dari masyarakat Tim sukses pasangan Ahok – Djarot ini pun melakukan berbagai macam cara untuk dapat mempengaruhi masyarakat agar memilih pasangan calon kandidat mulai dari mengadakan kegiatan sosialisasi, blusukan, menggelar pengajian, dan istigosah. Kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh tim sukses ini bertujuan untuk mengambil hati masyarakat agar mau memilih pasangan calon Ahok – Djarot. Sosialisasi yang dilakukan oleh tim sukses ini pun memfokuskan kepada warga Muslim yang ada di Jakarta dalam bentuk mengadakan kegiatan – kegiatan keagamaan. Sama halnya yang dikatakan oleh Sekretaris tim sukses Ahok – Djarot, Tubagus Ace Hasan Syadzily yang di lansir oleh Tirto.id (13 April 2017) yang mana ia mengajak warga yang hadir di acara pengajian yang telah diadakannya untuk memilih Ahok – Djarot pada tanggal 19 April 2017. Ia pun mengatakan jika masyarakat tidak memilih pertahanan, maka sama halnya mereka tidak bersyukur atas nikmat Allah yang telah memberikan seorang pemimpin yang telah memiliki kinerja yang bagus.

Tim sukses Ahok – Djarot ini tidak hanya mengajak masyarakat untuk memilih Ahok – Djarot dalam kegiatan keagamaan saja akan tetapi

tim sukses ini juga gencar mengadakan kampanye ke setiap rumah – rumah warga. Tim sukses Ahok – Djarot ini berfokus untuk meyakini masyarakat mengenai akan keberhasilan kinerja kepemimpinan Ahok – Djarot dalam dua tahun ia menjabat. Juru bicara tim sukses Ahok – Djarot, Raja Juli Antoni mengatakan:

*“kami meminta tim relawan untuk terus mengetuk pintu rumah dan pintu hati masyarakat agar mau menilai secara objektif keberhasilan (Ahok – Djarot)”* (tirto.id, 13 April 2017).

Dari penjelasan di atas tim sukses kemenangan Ahok – Djarot meminta untuk semua relawan pendukung Ahok – Djarot untuk gencar melakukan kampanye kepada masyarakat agar masyarakat mau memilih pasangan Ahok – Djarot. Tim sukses Ahok – Djarot melakukan hal ini untuk menarik perhatian masyarakat agar mau memilih Ahok – Djarot dengan cara melihat dari kinerja selama ia menjadi gubernur DKI Jakarta. kegiatan ini juga di harapkan mendapatkan respons positif dari masyarakat terkait isu – isu SARA yang beredar saat ini terkait dengan pasangan calon tersebut. tim sukses dan relawan juga berharap dengan semua usaha yang telah dilakukan ini berhasil mempengaruhi masyarakat agar mau memilih pasangan calon Ahok – Djarot.

Selain tim sukses dan para relawan Adapun artis – artis yang ikut mendukung pasangan calon Ahok – Djarot dalam Pilgub DKI Jakarta 2017. Yang mana dengan adanya dukungan dari arti – artis ini dapat

mempengaruhi masyarakat untuk memilih pasangan calo kandidat yang didukungnya. Para artis yang mendukung pasangan calon Ahok – Djarot ini pun ikut dalam blusukan menemui masyarakat bersama Ahok. Dukungan dari artis dalam Pilgub ini bukan pertama kalinya terjadi bahkan dari Pilpres 2014 lalu dukungan artis telah ramai ada. Dukungan dari artis – artis ini pun jelas mempengaruhi suara untuk pasangan calon kandidat tersebut, karena jelas para artis ini populer di kalangan masyarakat dan memiliki penggemar yang cukup banyak (kompas.com,20 November 2016).

Dapat ditarik kesimpulan dengan adanya pengaruh tim sukses Ahok – Djarot yang sangat kuat ini dapat menarik partisipasi masyarakat dalam memilih calon kandidat yang telah diusungnya. Dengan cara – cara yang dilakukan tim sukses Ahok – Djarot ini pun dapat di pastikan membuat masyarakat terlena akan perkataan yang telah disampaikannya. Pengaruh tim sukses ini pun sangat besar kaitannya dengan kemenangan pasangan calon kandidat yang mana tim sukses ini berjuang mati – matian untuk membuat elektabilitas pasangan calon ini baik di mata masyarakat. Tim sukses ini pun sangat berpengaruh untuk mendapatkan banyak suara dari masyarakat.

#### **b. Tim Sukses Anies – Sandi**

Tim sukses pada setiap calon kandidat sangat berfungsi untuk memenangkan persaingan antar calon kandidat itu sendiri. Dengan adanya tim sukses ini akan menimbulkan dampak yang positif ke pasangan calon

kandidat itu karena dengan adanya tim sukses ini akan dapat menyukseskan jalannya Pilkada yang akan dijalankan. Setiap masing – masing tim sukses calon kandidat pasti memiliki strateginya sendiri untuk memenangkan calon kandidat yang ia usung. Tim sukses ini juga akan menggunakan berbagai cara agar calon kandidat yang ia usung akan menang dan mendapatkan partisipasi suara dari masyarakat.

Tim sukses Anies – Sandi ini sama halnya seperti tim – tim sukses kebanyakan, mereka akan mendukung calon kandidat dengan menggunakan berbagai macam strategi untuk dapat menarik hati masyarakat Jakarta. Bentuk dukungan dari tim sukses Anies – Sandi ini juga tidak berbeda dengan tim sukses Ahok – Djarot. Tim sukses Anies – Sandi ini akan bersosialisasi ke pada masyarakat yang ada, tim sukses ini juga menggunakan media sosial untuk mengajak masyarakat dalam memilih pasangan Anie – Sandi ini. Karena dengan cara berkampanye menggunakan media sosial ini dianggap sangat efektif untuk menarik hati masyarakat, karena masyarakat telah banyak yang bisa menggunakan media sosial.

Untuk menarik perhatian masyarakat tim sukses Anies – Sandi ini juga menggunakan banyak strategi. Strategi mereka menggunakan cara belusukan bersama pasangan calon kandidat, dengan adanya belusukan ke masyarakat – masyarakat menengah ke bawah ini di harapkan akan mendapat simpatik dari masyarakat sekitar (kompas.com, 12 Desember 2016). Belusukan ini pun akan dilakukan oleh setiap tim sukses lainnya, karena belusukan ini telah lumrah dilakukan untuk mendapatkan simpatik



dari masyarakat. Jadi tidak heran dengan adanya belusukan ini akan menambah perolehan suara pada Pilgub DKI Jakarta 2017 (merdeka.com, 26 November 2016).

Selanjutnya tim sukses Anies – Sandi untuk menarik partisipasi masyarakat dengan menggunakan media sosial. Tim sukses pasangan calon Anies – Sandi ini melakukan kampanye via media sosial untuk memperkenalkan visi – misi dan gebrakan – gebrakan yang akan dilakukan pasangan calon kandidat untuk merubah ibu kota Jakarta. Koordinator relawan Digital Anies – Sandi ini pun mengatakan:

*“kami menghormati keputusan yang telah ditetapkan oleh KPU DKI untuk tidak menggunakan alat peraga kampanye selama putaran kedua. Jadi kita memfokuskan berkampanye menggunakan media sosial dan digital untuk penajaman visi – misi dan sosialisasi program”* (tirto.id, 18 Maret 2017).

Dari penjelasan di atas bahwa tim relawan Anies – Sandi menggunakan media sosial untuk berkampanye dikarenakan KPU melarang setiap calon kandidat berkampanye menggunakan alat peraga. Tim sukses Anies – Sandi ini juga memilih cara berkampanye menggunakan media masa ini juga karena dilihat masyarakat sudah banyak menggunakan media sosial jadi dengan begini media sosial lebih efektif menarik partisipasi masyarakat dalam memilih calon kandidat yang mereka usung. Ia pun mengatakan sejak mereka berkampanye melalui sosial media telah banyak relawan – relawan baru yang akan membantu untuk memenangkan pasangan Anies – Sandi. Walaupun dengan menggunakan media sosial banyak relawan yang ikut mendukung, akan

tetapi tim sukses ini tidak berpuas hati mereka akan terus melakukan cara – cara yang lain untuk mendapatkan banyak partisipasi masyarakat.

Tim sukses Anies – Sandi ini juga tidak hanya menggunakan media sosial sebagai penarik simpatik masyarakat, mereka juga menggunakan cara *door to door* ( dari pintu ke pintu). Cara yang dilakukan tim sukses ini juga dianggap lebih efektif untuk mengambil simpatik dari masyarakat, tim sukses Anies – Sandi juga akan menyuruh tim relawan untuk ikut melakukan *door to door* dan menjelaskan secara detail program kerja pasangan program – program yang akan dilakukan. Tim sukses ini menyuruh relawan untuk menyentuh hati masyarakat dengan cara mampu mengikuti kegiatan masyarakat. Relawan Anies – Sandi ini juga akan memberikan pengertian ke masyarakat dalam program kerja Anies – Sandi, mereka akan membandingkan program Anies – Sandi dengan pasangan calon kandidat yang lain, dan mereka juga akan mengeluarkan data untuk mempercayai masyarakat (kompas.com, 14 Desember 2016).

Dapat ditarik kesimpulan, dengan adanya tim sukses Anies – Sandi ini pasti masyarakat akan terpengaruh untuk memilih pasangan calon kandidat yang telah diusungnya. Tim sukses Anies – sandi ini menarik partisipasi masyarakat dengan menggunakan cara – cara yang sama dengan cara tim sukses lainnya. akan tetapi dengan kepiawaian berbicara para tim sukses dan relawan ini banyak masyarakat yang akan memilih pasangan calon Anies – Sandi. Tim sukses ini juga bersosialisasi menggunakan data yang real dan memberikan pengetahuan ke masyarakat

atas kinerja yang akan dijalankan pasangan calon kandidat ke depannya. Sudah jelas tim sukses memiliki pengaruh besar dalam keberhasilan pasangan calon kandidat dalam memenangkan Pilkada DKI Jakarta.

Dapat ditarik kesimpulan keseluruhan, bahwa pengaruh lingkungan dari masing - masing tim sukses calon kandidat ini sama - sama kuat dalam mempengaruhi masyarakat. Yang mana masing - masing tim sukses ini memiliki strategi dalam menarik perhatian masyarakat untuk memilih pasangan calon yang mereka usung. Sama halnya seperti tim sukses Ahok - Djarot yang mana pasangan calon yang mereka usung terkena kasus penistaan agama, akan tetapi mereka tetap optimis untuk melakukan pengaruh terhadap masyarakat. Tim sukses Anies - Sandi ini juga cukup kuat untuk memikat masyarakat untuk memilih calon kandidat yang mereka usung. Dengan berbagai macam strategi - strategi yang mereka punya.

## **2. Perilaku**

Bagian ini akan menjelaskan mengenai pro dan kontra perilaku calon kandidat di mata masyarakat. Yang pertama akan membahas mengenai perilaku calon kandidat Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) saat mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI Jakarta, dan kedua akan membahas mengenai perilaku calon kandidat Anies Baswedan saat mencalonkan diri sebagai calon gubernur di mata masyarakat Jakarta.

### **a. Perilaku Calon Kandidat Basuki Tjahaja Purna (Ahok)**

Calon kandidat gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ialah sosok yang fenomenal. Ia memiliki karisma yang terbangun dari gaya kepemimpinannya. Ia pun memiliki perilaku yang terkenal kasar, tegas, bahkan memiliki cara bicara yang blak – blakan. Walaupun demikian banyak yang menyebut perilaku Ahok persis dengan Ali Sadikin mantan gubernur DKI Jakarta ke 9 (tribunnews.com, 20 April 2018).

Perilaku Ahok yang dinilai kasar ini memicu terjadinya pro dan kontra di masyarakat. Di satu sisi masyarakat senang dengan perilaku Ahok karena perilakunya yang kasar, tegas bahkan ceplas – ceplos dalam berbicara dapat ditakuti oleh oknum – oknum yang berniat jahat (korupsi). Ada pun masyarakat yang tidak senang dengan perilaku Ahok karena dikatakan seorang pemimpin tidak boleh memiliki perilaku yang kasar karena perilaku itu hanya dapat menyakiti hati orang lain.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan Indri Novitasari sebagai warga Jakarta Barat (Mahasiswi), mengatakan bahwa:

*“ Perilaku Ahok yang terkesan kasar, tegas bahkan gaya bicaranya yang blak – blakan memang membuat banyak orang yang tidak menyukainya, akan tetapi dengan perilaku yang ia miliki dapat merubah Jakarta menjadi lebih baik lagi” (wawancara Indri Novitasari, 04 Januari 2019).*

Dari penjelasan di atas, meskipun Ahok memiliki perilaku ataupun gaya kepemimpinan yang terbilang kasar dan bahkan gaya bicaranya yang ceplas – ceplos akan tetapi ia memiliki jiwa yang tegas. Perilaku Ahok yang kasar memang membuat orang lain sakit hati. Akan tetapi dengan cara Ahok seperti ini akan membuat Jakarta jauh lebih baik lagi. Perilaku

Ahok yang kasar serta tegas ini dapat membuat orang takut bahkan segan terhadap dirinya. Dilihat dari kinerja Ahok saat ia menjadi gubernur DKI Jakarta menggantikan pak Joko Widodo saat itu telah berhasil menyelesaikan masalah yang ada di Jakarta bahkan hampir semua programnya telah terealisasi meskipun secara bertahap.

Dilihat dari gaya Ahok saat menjabat menjadi gubernur DKI Jakarta saat itu memang sering menimbulkan kontroversi, bahkan perilakunya itu banyak di tunggu – tunggu oleh masyarakat. Masyarakat Jakarta sendiri telah bosan dengan kepemimpinan yang tidak tegas bahkan sering melakukan kecurangan. Sosok Ahok inilah yang telah lama di inginkan masyarakat dengan keberanian yang ia miliki mampu memberantas oknum – oknum nakal dalam pemerintahan. Masyarakat pun senang dengan kinerja Ahok yang dinilai telah berhasil membuat pelayanan di Jakarta menjadi mudah tidak bertele – tele. Meskipun Ahok dikenal keras dan kasar bahkan emosinya sering meledak – ledak saat ia memarahi pekerja yang tidak disiplin itu semua dilakukan agar Jakarta maju. Sama halnya yang dikatakan oleh PNS yang bekerja di Jakarta, Basuki iya pun mengatakan bahwa sosok Ahok memang sangat tegas dan terbilang kasar, akan tetapi dengan sikap Ahok seperti itu dapat merubah kebiasaan PNS yang tidak disiplin. Mereka pun akan terus mendukung Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2017 (kompas.com, 04 Februari 2016).

Namun berbeda dengan pendapat dari informan Hana sebagai warga Jakarta Timur (mahasiswa), ia mengatakan bahwa:

*“ sikap Ahok yang arogan dan blak – blakan dalam berbicara tidak pantas menjadi pemimpin, karena dengan gaya Ahok yang seperti itu hanya dapat membuat orang sakit hati dan dapat memicu kontroversi”* (wawancara Hana, 04 Januari 2019).

Dari penjelasan di atas bahwa gaya Ahok selama ini yang terkesan kasar, blak – blakan, Arogan dan keras kepala ini tidak baik untuk menjadi seorang pemimpin, karena seorang pemimpin yang baik harus memiliki sikap yang baik dan tidak semena - mena kepada bawahan. Sikap yang dimiliki Ahok ini terkesan keras dan akan memicu kontroversi di masyarakat. Sikap ini pun tidak wajar bagi seorang pemimpin. Ia pun menilai sikap Ahok ini telah salah kaprah. Seharusnya bagi seorang pemimpin tidak diperbolehkan untuk berbicara kasar dan tidak boleh memiliki sikap arogan karena itu tidak baik bagi seorang pemimpin.

Dapat dilihat juga saat ia menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta lalu sikap yang ialihatkan di depan umum bukanlah mencerminkan sebagai seorang pemimpin yang baik. Dengan sikap kerasnya ini banyak masyarakat juga yang tidak menyukainya dan beranggapan bahwa sikap yang ia miliki tidak benar – benar mencerminkan sosok pemimpin yang baik. Perilaku Ahok saat ia menjadi gubernur dapat dilihat dari berbagai macam media masa dan Online yang mana banyak memberitakan atas perilakunya yang banyak menimbulkan kekesalan dan sakit hati di masyarakat dan pemerintah. Sama halnya yang telah dikatakan oleh Pengamat Sosial Politik Indonesia, Geisz Chalifah mengatakan sikap yang dimiliki Ahok tersebut tidak baik dijadikan seorang pemimpin yang akan memimpin rakyat. Karena telah banyak perilaku Ahok yang menimbulkan

kontroversi saat ia menjabat sebagai gubernur Jakarta. perilaku yang ia miliki pun bukan mencerminkan sosok pemimpin yang baik bagi umat Islam. Ia pun menghimbau kepada masyarakat untuk tidak memilih Ahok dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 (merdeka.com, 11 Maret 2016).

Sikap yang dimiliki Ahok juga tidak dapat diterima oleh segelintir masyarakat Jakarta karena sikap Ahok yang cenderung kasar dan kata – kata yang dipakai Ahok saat berbicara tidak tertata atau asal bicara. Sama halnya yang telah dikatakan oleh Dodi Ambardi selaku Pengamat Politik dari Universitas Gajah Mada (UGM), yang mana dilihat dari segi positifnya, sikap Ahok yang blak – blakan ini menjadi terapi kejut bagi kinerja birokrasi akan tetapi sikap yang seperti ini dapat dinilai negatif oleh masyarakat sehingga berlangsung ke pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017 (kompas.com, 28 April 2016).

Dapat ditarik kesimpulan perilaku atau sikap Ahok yang tegas, keras, arogan hingga blak – blakan dapat memicu kontroversi di masyarakat dan dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Perilaku atau yang dimiliki Ahok ini juga menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Perilaku yang dimiliki Ahok sebenarnya bagus untuk menjadi teladan bagi setiap pemimpin karena ia memiliki keberanian dan sikap yang tegas kepada kinerja birokrasi bahkan ia memiliki kinerja yang lebih baik untuk membangun Jakarta yang bersih tanpa korupsi. Tetapi sikap ceplak – ceplosnya dan sikap kasar yang ia miliki tidak baik untuk diikuti oleh pemimpin yang lain.

## **b. Perilaku Calon Kandidat Anies Baswedan**

Calon kandidat gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan adalah sosok yang fenomenal dalam dunia pendidikan. Anies sendiri memiliki sikap yang tegas, lemah lembut dan ramah kepada setiap orang. Sikap tegas dan ramahnya ini banyak di sukai disetiap kalangan masyarakat. Akan tetapi sedang sikap yang lemah lembutnya ini banyak juga masyarakat yang menganggap bahwa ia tidak cocok menjadi pemimpin DKI Jakarta 2017. Dari sikap yang ia miliki ini muncul pro dan kontra di masyarakat Jakarta.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti melalui wawancara dengan Addin Khaerunnisa Juswil, sebagai warga Jakarta Timur (Mahasiswa), mengatakan bahwa:

*“Anies sendiri dikenal memiliki sikap yang ramah dan tegas terhadap orang lain. dari sikap ini ia pantas menjadi gubernur DKI Jakarta 2017, selain ini Anies adalah orang yang Sholeh”* (hasil wawancara Addin Khaerunnisa Juswil, 03 Januari 2019).

Dari penjelasan di atas bahwa sikap Anies yang dinilai sopan dan ramah hingga tegas ini sangat cocok menjadi pemimpin. Dengan sikap yang seperti ini akan menimbulkan reaksi positif dari masyarakat. Anies yang dikenal sebagai seorang yang sangat mengerti pendidikan dan Sholeh ini dirasa akan dapat memajukan Jakarta dan masyarakatnya jauh lebih baik dari sebelumnya. Sikap ramah yang ia miliki pun membuat masyarakat senang karena mereka mudah untuk langsung berkomunikasi tanpa rasa segan.



Masyarakat pun merasa senang dengan kehadiran Anies menjadi calon kandidat gubernur DKI Jakarta karena dengan hadirnya Anies menjadi pemimpin Jakarta dapat merubah wajah ibu kota menjadi semakin baik. Tutar kata yang Anies miliki pun terkesan sangat sopan tanpa menyakiti hati orang lain. walaupun tutur kata dan perilaku sopan ia tetap berwibawa dan tegas dalam setiap hal. Sikap ini pun yang kemudian membuat masyarakat merasa senang karena menjadi seorang pemimpin harus memiliki Akhlak yang baik sesuai dengan ajaran agama Islam. Masyarakat pun percaya dengan sikap lemah lembut dan sopan yang iya miliki ini masyarakat akan jauh lebih baik dan tidak ada konflik didalamnya (okezonenews.com, 11 April 2017).

Namun berbeda dengan pendapat dari M. Alfiansyah sebagai warga Jakarta Selatan (mahasiswa), ia mengatakan bahwa:

*“ sikap lemah lembut Anies ini tidak cocok menjadi pemimpin apa lagi untuk memimpin Jakarta yang terkenal keras. Masyarakat membutuhkan pemimpin yang berani untuk dapat memberantas kejahatan di ibu kota”* (wawancara M.Alfiansyah, 04 Januari 2019).

Dari penjelasan di atas bahwa sikap yang Anies miliki ini tidak cocok menjadi pemimpin Jakarta karena Jakarta telah dikenalkeras dalam segala hal. Mulai dari kekerasan hingga banyaknya antek – antek asing yang dapat membuat masyarakat Jakarta sengsara. Sikap lemah lembut itu dirasa tidak cukup membuat oknum jahat kapok. Masyarakat hanya menginginkan pemimpin yang tegas terhadap segala sesuatu masalah yang ada di Jakarta agar Jakarta menjadi lebih baik lagi.

Sama halnya yang telah di ungkapkan oleh M. Nizzar ia menilai bahwa Anies hanya bisa membangun opini dan oposisi saja agar dapat menjaga *image* didepan masyarakat. Sikap ini dikarenakan dulunya ia berlatar belakang sebagai seorang akademisi. Berlatar belakang seorang akademisi, masyarakat merasa Anies hanya bisa beropini saja tanpa bisa menunjukkan hasil kerja nyata. Jakarta menginginkan perubahan besar yang dapat membuat Jakarta dinilai lebih baik. Sikap Anies yang lemah lembut ini juga tidak bisa membuat masyarakat Jakarta maju yang ada masyarakat menjadi santai dalam segala hal. Masyarakat juga merasa saat Anies menjadi seorang pemimpin Ibu Kota Jakarta ia tidak berhasil memberantas polemik yang ada di Jakarta.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa perilaku Anies yang terkesan lemah lembut dan sopan ini banyak menarik perhatian masyarakat untuk memilih dirinya saat Pilkada DKI Jakarta. Walaupun perilaku Anies menimbulkan pro dan kontra di masyarakat akan tetapi tidak menurunkan elektabilitasnya. Perilaku lemah lembut dan sopan akan tetapi tegas ini mencerminkan sosok pemimpin umat Islam. Perilaku seperti ini banyak diinginkan oleh masyarakat, karena dengan perilaku seperti ini masyarakat tidak segan untuk mengeluarkan uneg – uneg yang selama ini membebani mereka.

Ditarik kesimpulan keseluruhannya bahwa perilaku setiap calon kandidat ini memang dapat menarik perhatian masyarakat bahkan dapat menarik partisipasi suara masyarakat. Perilaku setiap calon kandidat ini

pun menimbulkan pro dan kontra yang mana pro dan kontra tersebut dapat menaikkan elektabilitas masing – masing calon kandidat. Masing – masing masyarakat memiliki kriteria calon pemimpin yang mereka impikan. Masing – masing perilaku kandidat sangat berbeda dan memiliki gayanya masing – masing. Gaya perilaku Ahok seperti yang di ketahui ia memiliki perilaku yang kasar, keras, bahkan blak – blakan saat berbicara dikatakan kurang pantas bagi seorang pemimpin. Dan perilaku Anies yang lemah lembut, sopan dan tegas ini banyak di nantikan oleh masyarakat, bahwa perilaku yang mencerminkan sosok pemimpin Islam yang baik.

### **3. Norma**

Bagian ini akan menjelaskan dua hal, yakni Undang – Undang Nomor 10 tahun 20 16 dan fatwa MUI. Undang – Undang nomor 10 tahun 2016 ini akan berbicara mengenai pemilihan gubernur yang telah di tetapkan, dan fatwa MUI akan membahas mengenai pemilihan gubernur yang sesuai dengan agama yang telah ditetapkan. Hal yang akan di bahas ini tentu terkait dengan Pilgub DKI Jakarta 2017.

#### **a. Peraturan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016**

Peraturan untuk memilih calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati , hingga calon walikota sudah tertera di undang – undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Peraturan yang telah ditetapkan untuk memilih gubernur, bupati, hingga memilih walikota itu pun telah disetujui oleh Presiden. Hingga peraturan itu menjadi pedoman untuk semua calon yang akan mengikuti Pilkada. Peraturan ini telah lama

adanya sehingga telah digunakan diseluruh penjuru kota hingga pelosok Indonesia.

Peraturan pemilihan calon kepala daerah itu telah di tulis ke dalam Undang – Undang Nomor 10 tahun 2016 yang berisikan tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dalam undang – undang tersebut telah jelas dituliskan siapapun berhak mencalonkan diri menjadi gubernur, bupati, dan walikota di negara Indonesia. Bunyi tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota itu terdapat di pasal (7) ayat (1) didalamnya berbunyi :

*“ setiap warga yang bernegara wajib berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk dapat mencalonkan diri dan di calonkan sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, hingga Calon Walikota dan Wakilnya” (UU nomor 10 tahun 2016).*

Dari penjelasan di atas dilihat dari pasal (7) ayat (1) ini bahwa semua warga yang bernegara Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia wajib memiliki hak untuk mendapatkan kesempatan menjadi seorang pemimpin daerah. Didalam ayat tersebut juga menjelaskan bahwa negara Indonesia tidak membeda – bedakan setiap warganya yang ingin mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah.

Dalam undang – undang nomor 10 tahun 2016 pasal (7) ayat (1) jelas bahwa setiap warga Indonesia memiliki hak wajib mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Indonesia adalah negara demokrasi yang mana setiap warganya memiliki hak untuk berpartisipasi dalam segala hal. Negara demokrasi dipenuhi oleh peraturan – peraturan yang telah

ditetapkan oleh pemerintah yang mana warga/ masyarakatnya harus mengikuti peraturan tersebut. Indonesia pun banyak memiliki ragam suku, agama, budaya, dan ras yang mana semua berkumpul menjadi satu yang disebut Bhinneka Tunggal Ika. Masyarakat juga memiliki toleransi yang besar dalam membangun kehidupan. Dalam mencalonkan diri sebagai pemimpin daerah tidak dilihat berdasarkan agama, ras, suku, dan budaya akan tetapi yang dilihat dari kemampuannya yang ia miliki untuk dapat membangun daerah menjadi lebih baik lagi.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti melalui wawancara dengan informan Bella sebagai warga Jakarta (mahasiswi), mengatakan bahwa:

*“Dalam undang – undangan jelas semua masyarakat memiliki hak untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerahkan. Dan harus saling menghargai satu sama lain”* (hasil wawancara Bella, 04 Januari 2019).

Dari penjelasan di atas bahwa peraturan yang dibuat pemerintah itu jelas setiap warga memiliki haknya dalam berpartisipasi menjadi calon kepala daerah. Setiap warga yang bernegara Indonesia juga memiliki andil untuk memilih dan menetapkan seseorang yang pantas menjadi seorang pemimpin. Peraturan yang dibuat itu pun tidak ada membedakan warganya yang ini mencalonkan diri menjadi kepala daerah dengan agama, suku, ras, dan budayanya. Sama halnya saat Pilgub DKI Jakarta 2017 yang mana masing – masing calon gubernur dan wakil gubernur ini berbeda ras, suku, agama, dan budayanya. Dalam peraturan ini tidak mempermasalahkan semua itu hanya saja semua calon gubernur dan wakil gubernur telah

memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk menjadi gubernur.

Pilkada DKI Jakarta 2017 calon gubernurnya telah mengikuti semua peraturan yang ada dalam undang – undang nomor 10 tahun 2016 tersebut dengan sebaik mungkin. Semua calon gubernur berasal dari warga yang bernegara Indonesia sesuai dengan undang – undang. Sejak lama Pilkada telah dilaksanakan dan telah mengikuti peraturan undang – undang yang ada tidak terlihat adanya perselisihan ataupun permasalahan selama itu. Berbeda dengan Pilkada DKI 2017 didalam Pilkada tersebut muncul banyak polemik yang membuat buruknya wajah demokrasi saat itu. Saat Pilkada pemilihan gubernur akan dilaksanakan banyak isu – isu yang muncul berbau SARA. Politik identitas pun menuai banyak perhatian pasalnya banyak munculnya identitas seperti, Kafir, Muslim, Cina, dan lain – lainnya dengan adanya isu yang menyinggung SARA ini justru akan membuat perpecahan diantara masyarakat yang selama ini telah berdampingan hidup bersama (republik.co.id, 10 Mei 2016).

Kemunculan Isu SARA pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu menjadi sorotan di ranah dunia politik. Pasalnya isu SARA dalam pemilihan calon kepala daerah ini sangat membuat heboh dunia perpolitikan karena politik yang selama ini di jalankan berjalan demokratis. Pilkada yang selama ini dilaksanakanpun sudah sesuai dengan peraturan yang telah dibuat. Menurut Arif Susanto selaku pengamat politik yang dilansir oleh Kompas.com (26 Desember 2017), Pilkada DKI Jakarta yang tengah dilaksanakan ini telah tercampur oleh SARA yang mana isu

SARA ini dapat mempengaruhi pemikiran masyarakat yang ada. Pilkada berbau SARA ini tidak sesuai dengan peraturan yang ada dalam Undang – undang Nomor 16 tahun 2010 karena setiap warga negara wajib memiliki hak untuk menjadi seorang pemimpin daerah tidak dilihat dari ras, suku, agamanya.

Dapat ditarik kesimpulan, bahwa dalam Peraturan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang dibuat oleh pemerintah ini tidak dapat lagi di ganggu gugat karena peraturan ini sudah disepakati oleh semua pihak di pemerintahan. Adanya isu SARA di Pilkada DKI Jakarta 2017 ini juga tidak dapat mempengaruhi pemerintah untuk menghapus peraturan yang telah dibuatnya. Kasus Pilkada DKI Jakarta 2017 itu pun mencuat adanya kasus larangan memilih pemimpin non- Muslim, padahal didalam undang – undang tersebut tidak ada larang non – Muslim untuk boleh menjadi seorang pemimpin.

#### **b. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)**

Pilkada DKI Jakarta 2017 menuai konflik yang sangat panas pasalnya saat Pilkada itu dilaksanakan banyak terjadi masalah didalamnya, mulai dari adanya isu – isu yang berbau SARA, politik identitas, dan hingga pada kasus penistaan agama yang dilakukan oleh salah satu calon gubernur DKI Jakarta. Banyaknya kasus tersebut dapat mencoreng dunia perpolitikan di Indonesia. Isu SARA dan politik identitas pada Pilkada DKI Jakarta 2017 ini terlihat banyak digunakan untuk menjatuhkan dan

menekan elektabilitas lawan saingannya. Isu SARA ini juga memicu terjadinya konflik yang berkepanjangan di lingkungan masyarakat.

Dari banyaknya permasalahan jelang Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu membuat MUI tertarik untuk mengikuti permasalahan yang sedang terjadi saat itu hingga MUI mengeluarkan fatwanya. Saat kasus penistaan agama yang dilakukan oleh salah satu calon gubernur DKI Jakarta yaitu Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membuat heboh jagat raya dan membuat banyak umat Muslim sakit hati dengan ucapannya lalu MUI menggelar musyawarah terkait kasus tersebut. Fatwa yang dikeluarkan MUI ini telah sesuai dengan kasus Ahok yang telah menghina ayat suci Al – Quran Dimana dalam pidato di Kepulauan Seribu Ahok mengutip surat Al – Maidah ayat 51 untuk menarik perhatian masyarakat. Ahok dinyatakan bersalah karena telah menodai agama Islam dengan perkataannya.

Saat masalah Ahok ini mencuat ke publik, MUI pun mengeluarkan fatwanya terhadap kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok, yang mana fatwa itu tertuliskan Pernyataan Basuki Tjahaja Purnama dikategorikan : (1) menghina Al-Quran dan atau (2) menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum. Fatwa MUI ini membuat Ahok di hukum sesuai dengan peraturan yang ada, fatwa ini pun menimbulkan banyak permasalahan di masyarakat. fatwa ini pun dibuat untuk menanggapi pidato Ahok saat di kepulauan seribu yang mengutip surah Al – Maidah ayat 51 dan mengatakan jangan mau di bodohi oleh surat tersebut. Sebelum adanya kasus Ahok di kepulauan seribu yang menyebabkan MUI mengeluarkan fatwanya ini, adapun MUI mengeluarkan fatwa yang



mengatakan untuk tidak memilih calon pemimpin yang berasal dari non – Muslim. Fatwa tersebut dikeluarkan oleh Din Syamsuddin selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak tahun 2014, berbunyi:

*“ Seorang Muslim harus memilih pemimpin Muslim ”*

(kbri.id.com).

Dari penjelasan di atas bahwa jelas MUI telah mengeluarkan fatwanya mengenai larangan untuk memilih pemimpin non- Muslim. Seorang Muslim wajib memilih pemimpin yang seagama yang dapat mengayomi masyarakatnya sesuai dengan kaidah – kaidah Islam. Ia pun mengatakan telah tertera didalam ayat suci Al – Quran bahwa adanya larangan tegas untuk tidak memilih pemimpin yang tidak seagama dan pemimpin yang telah mengejek agama Islam. Syamsyuddin mengatakan itu adalah firman dari ALLAH SWT dalam Al – Quran surat Al – Maidah ayat 55 dan 57 (republik.co.id, 21 Maret 2014).

Fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI ini banyak menuai konflik di masyarakat. Fatwa ini pun dapat memecah belahkan masyarakat yang ada di Indonesia. Fatwa MUI ini juga menuai pro dan kontra tidak hanya di masyarakat tetapi sampai ke tokoh – tokoh pening yang ada. MUI pun menegaskan bahwa mereka tidak sembarangan untuk mengeluarkan fatwa ini akan tapi mereka mengeluarkan fatwa ini karena sesuai dengan Al – Quran yang ada.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti melalui wawancara dengan informan Feyzars Ma'ruf, sebagai warga Jakarta (mahasiswa), mengatakan bahwa:

*“ Dengan adanya fatwa MUI itu saya setuju, karena umat Muslim memang harus di pimpin oleh seorang pemimpin yang mengerti dengan agama dan memiliki Akhlak yang baik”* (hasil wawancara Feyzars Ma'ruf 03 Januari 2019).

Berdasarkan pernyataan di atas, MUI telah benar mengambil langkah untuk mengeluarkan fatwanya, karena MUI telah berpedoman terhadap Al – Quran. MUI pun tidak sembarangan dalam mengeluarkan fatwanya yang bisa menjadikan pedoman bagi umat Islam dalam memilih pemimpin. Larangan yang dikeluarkan oleh MUI ini sendiri jelas larangan dari Allah dan Rasulnya yang mana setiap umat Islam harus mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Fatwa yang dikeluarkan MUI ini juga semata mata tidak hanya larangan untuk memilih pemimpin saja, akan tetapi Fatwa MUI yang mengatakan Ahok sebagai seorang penista agama ini jugadikeluarkan setelah melewati berbagai macam diskusi oleh para Ulama.

Saat Pilkada DKI Jakarta 2017 MUI mengeluarkan Fatwa bahwa Ahok adalah seorang menistakan agama yang jelas juga telah menghina para Ulama. Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI ini banyak menimbulkan perdebatan di kalangan tokoh – tokoh dan masyarakat. fatwa ini juga membuat masyarakat terpengaruh untuk tidak memilih Ahok pada saat Pilkada DKI Jakarta. karena pemimpin yang baik ialah pemimpin yang menghormati agama dan ulamanya. Lalu fatwa MUI yang melarang

masyarakat untuk tidak memilih pemimpin non – Muslim ini pun masih dilakukan oleh masyarakat hingga sekarang saat pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017. fatwa MUI ini pun banyak mengubah pandangan masyarakat yang awalnya mereka tidak mengerti dalam memilih pemimpin yang baik menjadi mengerti untuk memilih pemimpin yang baik bagi dirinya.

Adapun masyarakat yang setuju dengan adanya fatwa yang telah dikeluarkan MUI karena mereka menanggapi fatwa yang telah dikeluarkan memang sesuai dengan perintah Allah SWT yang tertera didalam Al – Quran dan hadistnya. Dalam Islam agama adalah pedoman hidup yang harus di taati, semua persoalan dalam kehidupan telah di atur oleh Allah ke dalam Al – Quran dengan sebaik – baiknya baik perekonomian maupun politik. konteks politik ini ialah menyangkut persoalan memilih wali (pemimpin) yang sesuai dengan syariat Islam, maka dari itu umat Muslim harus mematuhi. Larangan untuk memilih pemimpin non- Muslim juga dikarenakan Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam jadi sebaik – baiknya pemimpin non - Muslim lebih baik pemimpin yang bersal dari agama Muslim. Mungkin saja di negara yang minoritas penduduknya Muslim boleh memilih pemimpin bersal dari agama non-Muslim karena harus menghormatinya.

Hal ini pun juga dikatakan oleh pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab yang dilansir Kompas.com (28 Februari 2017) bahwa umat Islam tidak boleh memilih pemimpin non- Muslim jelas di tulis dalam Al – Quran dan ayat – ayat sucinya. Ia pun mengatakan bahwa umat Islam tidak boleh menjadikan non – Muslim sebagai sahabatnya apa lagi

sebagai seorang pemimpin haram hukumnya. Larangan itu pun tidak hanya terdapat di surat Al – Maidah saja akan tetapi larangan itu juga ada di surat Al Imran ayat 28 sedikit menyimpulkan yang artinya janganlah engkau orang – orang mukmin mengambil wali (pemimpin) dari orang – orang kafir dan meninggalkan orang – orang mukmin. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka lepas dari pertolongan Allah. Jelas telah banyak ayat suci Al – Quran yang melarang umat Muslim memilih pemimpin non – Muslim dan tindakan yang diambil oleh MUI pun telah benar untuk mengingatkan umat Muslim.

Akan tetapi ada berbeda dengan pendapat dari informan M. Alfiansyah sebagai warga Jakarta Selatan (mahasiswa), ia mengatakan bahwa:

*“saya tidak setuju dengan adanya fatwa MUI ini, karena fatwa yang dikeluarkan ini berkonteks di negara Berdemokrasi dan fatwa ini hanya akan menimbulkan konflik di masyarakat”*(hasil wawancara M. Alfiansyah 04 Januari 2019).

Berdasarkan pendapat di atas memang dibenarkan fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI, akan tetapi disini Indonesia adalah negara demokrasi yang mana semua masyarakatnya memiliki hak untuk memilih dan berpendapat. Tidak boleh ada batasan dalam memilih maupun mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Konteks politik pun tidak boleh di kaitkan oleh agama karena itu jauh berbeda. Fatwa yang dikeluarkan pada saat Pilkada DKI Jakarta ini pun dapat menimbulkan konflik antar masyarakat.

Dengan adanya fatwa yang dikeluarkan oleh MUI ini membuat hilangnya toleransi beragama yang di rasakan oleh masyarakat. Masyarakat merasa dengan adanya fatwa ini membuat masyarakat yang ada menjadi terpecah belah hingga memunculkan perbedaan pendapat. Dapat di ketahui Indonesia bukan hanya ditempati oleh umat beragama Islam saja akan tetapi juga ada beragam agama didalamnya. Dalam undang – undang yang mengatur pemilihan calon kepala daerah tidak ada larang dalam untuk memilih pemimpin non – Muslim karena semua warga memiliki hak yang sama atas haknya.

Sama halnya yang dikatakan oleh Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), Rusmadi yang di lansir oleh Kompas.com (15 September 2016) NU memiliki fatwa sendiri yang memperbolehkan umat Muslim untuk memilih pemimpin non Muslim pada tahun 1999. Dalam fatwanya ada tiga poin untuk boleh memilih pemimpin non-Muslim. Pertama jika memang tidak ada umat Muslim yang mampu memimpin, kedua ada memang calon dari umat Islam, akan tetapi khawatir jika ia berkhianat, disini konteksnya boleh memilih pemimpin non- Muslim yang di percayai amanah, dan ketiga tidak apa – apa memilih pemimpin non- Muslim selama pemimpin tersebut dianggap tidak mengancam umat Islam.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya fatwa MUI yang dikeluarkan ini dapat mempengaruhi masyarakat dalam pemilihan calon gubernur di Pilkada DKI Jakarta 2017. Fatwa yang menyatakan Ahok sebagai seorang dan fatwa MUI yang melarang umat Muslim memilih pemimpin non Muslim ini juga cukup menyita perhatian masyarakat

Jakarta pasalnya dengan adanya fatwa yang dikeluarkan MUI ini masyarakat akan terpengaruh untuk tidak memilih calon gubernur non – Muslim, yang saat itu ada maju mencalonkan diri sebagai calon Gubernur DKI Jakarta 2017. Keluarnya fatwa ini pun dapat memecah belahkan masyarakat dan berdampak terjadinya konflik dalam pemilihan calon gubernur DKI Jakarta 2017. Walaupun dengan adanya fatwa ini ada pun masyarakat yang tetap memilih pemimpin non – Muslim karena mereka melihat dari kinerja yang telah ia lakukan untuk Jakarta.

Dapat ditarik kesimpulan keseluruhannya, bahwa didalam indikator norma tersebut terdapat 2 parameter yang mana 2 parameter itu ialah, undang – undang nomor 10 Tahun 2016 dan Fatwa MUI. Didalam undang – undang nomor 10 tahun 2016 ini jelas dikatakan bahwa seluruh warga Indonesia berhak menjadi seorang pemimpin tanpa dilihat dari suku, ras, agama, dan budayanya. Akan tetapi realitanya pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu isu Sara terhadap salah satu calon Gubernur (Ahok) ini membuat ricuh pada pemilihan Pilkada DKI Jakarta yang mana masyarakat banyak mengaitkan agama, suku, dan ras didalam Pilkada DKI Jakarta tersebut. Fatwa MUI, adanya fatwa MUI juga salah satu yang dapat mempengaruhi masyarakat Jakarta untuk memilih calon gubernur di Pilkada DKI Jakarta 2017. Adanya Fatwa ini pun menjadikan panasnya jalan perpolitikan di Pilkada DKI Jakarta. fatwa ini pun banyak menimbulkan permasalahan dan perdebatan antar masyarakat pasalnya fatwa MUI yang telah dikeluarkan ini dapat mempengaruhi masyarakat untuk memilih pasangan calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

#### **4. Teknologi**

Media sosial maupun media massa saat ini sering digunakan menjadi media penyebar berita kebencian dan kebohongan. Walaupun tidak semua media sosial maupun media massa mengungkap kebencian akan tetapi di balik itu semua ada kepentingan untuk satu tujuan. Efek yang di berikan dari berita atau informasi yang tidak sesuai dengan faktanya dapat membuat terpecah belahnya masyarakat Indonesia yang telah termakan rayuan dari berita Hoax tersebut. Dengan adanya berita hoax itu pun dapat membuat panas kondisi perpolitikan (Kompas.com. 11 Januari 2017).

Isu – isu hoax ini telah menjadi permasalahan di tanah air bahkan sampai menjadi isu global. Merambahnya media sosial yang tidak sesuai dengan nilai – nilai bangsa ini dapat berdampak buruk terhadap pola pikir masyarakat. Media sosial hakikatnya adalah tempat menyebarkan berbagai informasi yang ada baik maupun buruk. Media sosial juga menjadi tempat berpolitik yaitu seperti pemilihan pemimpin baru. Penggunaan media sosial juga tempat mencari partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi (kompas.com, 14 Februari 2017).

Merambahnya media sosial di dunia perpolitikan dapat mempengaruhi masyarakat dalam memilih calon kepala daerah. Pada Pilkada DKI Jakarta 2017 menjadipuncak penyebaran berita hoax dan berita SARA di media – media Online. Pilkada DKI Jakarta itu pun banyak diwarnaidengan berita hoax dan berita kebencian yang beredar di media sosial dan media massa yang dapat mempengaruhi masyarakat

dalam memilih pasangan calon gubernur. Informasi hoax pada Pilkada ini dapat memecah belahkan buplik dan memecah belah masyarakat menjadi kubu – kubu yang keras (Alam, 2009:65).

Berkembangnya berita hoax berbau SARA ini tidak hanya di *instragram*, *facebook*, maupun *twitter*, berita hoax ini pun tengah merambah ke media massa seperti berita – berita yang ada saat ini. Berita – berita seperti ini sangat berbahaya karena dapat menimbulkan opini negatif di masyarakat. Sama halnya yang telah disampaikan oleh Komisi Informasi Pusat (KPI), menyatakan penyebaran berita hoax dan berita kebencian sangat berbahaya dan pada putaran pertama Pilkada DKI Jakarta berita hoax dan kebencian itu pun meningkat. Penyebaran kebencian menggunakan isu SARA dampaknya sangat parah dari pada politik uang, karena berita berbau SARA akan terus ada hingga Pilkada – Pilkada selanjutnya (Sindonews.com. 22 Mei 2017)

Pada saat Pilkada DKI Jakarta 2017 yang telah diselenggarakan banyak berita – berita hoax menyebar kebencian untuk masing – masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Berita – berita hoax ini pun tidak hanya tersebar di akun Facebook akan tetapi berita penyebar kebencian ini telah menyebar ke setiap media masa dan media sosial dengan kedok untuk menurunkan elektabilitas masing – masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dan dengan adanya berita miring tersebut dapat mengubah pilihan masyarakat untuk memilih pasangan calon yang dinilai baik di media masa. Munculnya berita hoax ini juga menjadikan faktor terbesar yang dapat mempengaruhi masyarakat dalam



mengubah dan memilih calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada DKI Jakarta. sama halnya yang telah dikatakan oleh Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yudha, mengatakan faktor – faktor yang mempengaruhi masyarakat mengubah pilihannya pada Pilkada DKI Jakarta 2017 ini karena adanya informasi di media sosial. Pengaruh media sosial ini pun cukup tinggi yaitu sebesar 21, 39 % (Kompas.com. 01 Februari 2017).

Berita hoax atau berita yang dianggap benar tidak lagi mudah ditemukan. Survey Mastel (2017) mengungkapkan bahwa dari 1.146 responden, 44,3% diantaranya menerima berita hoax setiap hari dan 17,2% menerima lebih dari satu kali dalam sehari. Bahkan media arus utama yang diandalkan sebagai media yang dapat dipercaya terkadang ikut terkontaminasi penyebaran hoax. Media arus utama juga menjadi saluran penyebaran informasi/berita hoax, masing-masing sebesar 1,20% (radio), 5% (media cetak), Pengaruh media sosial ini pun cukup tinggi yaitu sebesar 21, 39 % dan 8,70% (televisi) (Juditha 2018: 31- 32).

Jelas informasi yang ada baik di media sosial bahkan media masa cenderung mempengaruhi masyarakat dalam memilih, kasus ini sama halnya di Pilkada DKI Jakarta 2017, yang mana media sosial banyak menyebarkan isu kebencian dan menyebarkan isu SARA menggunakan agama, etnis dan suku. Penyebaran media sosial yang tidak bertanggungjawab ini pun membuat panasnya Pilkada DKI Jakarta 2017, pasalnya informasi yang telah diberikan oleh media sosial ini tidak sesuai fakta yang ada, dan lebih untuk menjatuhkan pihak lawan saja. Pengaruh

media sosial mengangkat isu yang tidak kredibel juga dapat mempengaruhi elektabilitas masing – masing calon gubernur dan wakil gubernur (tirto.id. 18 April 2017). Penyebab kekalahan pasangan Ahok – Djarot ini pun di karenakan viralnya blunder Sembako oleh kubu Ahok – Djarot pada saat hari tenang Pilkada DKI Jakarta viralnya video tersebut telah meluas di berbagai macam media. Kemenangan Anie – Sandi ini juga juga salah satunya media sosial yang mana pada dua Minggu terakhir masa kampanye Pilkada DKI Jakarta, tim suksesnya sangat insentif untuk membagikan video, meme, dan pesan sosial yang mengarah ke isu kebangsaan (detik.news. 20 April 2017).

Dapat ditarik kesimpulan bahwa, Kecanggihan teknologi saat ini juga dapat mempengaruhi pilihan masyarakat terhadap calon Gubernur dan wakil gubernurnya pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Pasalnya dengan kecanggihan teknologi ini seperti media masa dan media sosial ini dapat dijadikan senjata menyebarkan kebencian dan berita – berita hoax untuk dapat mengambil perhatian masyarakat Jakarta. Pada Pilkada DKI Jakarta 2017 banyak diwarnai dengan munculnya berita – berita yang berisikan kebohongan dan kebencian. Berita – berita tersebut dapat membawa pengaruh buruk terhadap pemikiran masyarakat terkait Pilkada yang diselenggarakan. Berita – berita hoax di media sosial ini juga dapat menimbulkan perpecahan dan pertarungan argumen di masyarakat.

## 5. Keyakinan

Panasnya persaingan jelang Pilkada DKI Jakarta 2017, diwarnai oleh banyaknya kontroversi. Di antara banyaknya Pilkada yang digelar oleh KPU, Pilkada Jakarta lah yang paling banyak menarik perhatian publik, baik di ranah nasional sehingga ranah internasional. Ramainya Pilkada Jakarta ini karena diwarnai dengan adanya isu SARA yang membuat munculnya konflik di masyarakat. Isu – isu sara yang berbau agama dalam Pilkada ini membuat resah masyarakat, pasalnya dengan adanya Isu terhadap agama ini banyak masyarakat yang bingung untuk memilih calon kandidat (bbc.com. 24 Maret 2017).

Pilkada DKI Jakarta 2017 memiliki kekuatan pengaruh agama yang kuat untuk dapat melobi partisipasi masyarakatnya. Dapat diketahui memang masyarakat Indonesia mayoritas penduduknya Islam akan tetapi dengan adanya politik berbau agama ini dapat menghilangkan toleransi antar masyarakat. Bahkan media terus – terusan menyebarkan berita mengenai agama yang dapat meracuni pikiran masyarakat. Pilkada DKI Jakarta ini juga ramai di bicarakan karena didalamnya juga ada fatwa untuk tidak memilih pemimpin yang tidak seagama dari MUI (republik.co.id, 21 Maret 2014).

Masyarakat menjadi resah bukan hanya karena ada larangan dari MUI saja akan tetapi mereka resah juga karena maraknya spanduk yang tertuliskan larangan menshalat jenazah yang memiliki perbedaan terhadap pandangan politik. larangan – larangan yang muncul saat Pilkada DKI tersebut membuat masyarakat bingung akan memilih calon kandidat dan

masalah seperti ini hanya akan membuat masyarakat bermusuhan atau saling membenci satu sama lain. Direktur Moderat Muslim Society, Agus Muhammad, mengatakan kecenderungan untuk menggunakan setatement agama dalam berpolitik Pilkada itu sangat tidak baik bagi masyarakat dalam berdemokrasi. Setatement agama ini pun akan memiliki dampak yang cukup besar di kehidupan masyarakat tidak hanya saling bermusuhan akan tetapi akan terpecah belah menjadi kubu –kubu. Situasi yang terjadi juga dapat menghancurkan modal sosial yang sudah kondusif bagi keragaman dan perbedaan. Ia pun mengatakan jika tidak memperbaiki kohesi sosial ini maka masyarakat akan lebih lama untuk bermusuhan, pasalnya untuk memperbaiki situasi ini membutuhkan waktu yang sangat lama (Beritasatu.com. 14 Maret 2017).

Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu pertama kalinya di perpolitikan yang mengangkat isu SARA didalamnya. Pengaruh keyakinan ini begitu besar dalam menarik partisipasi masyarakat, karena agama dijadikan alat untuk memilih pasangan calon gubernur DKI Jakarta 2017. Pengaruh keyakinan ini pun menjadikan masyarakat resah dan bimbang untuk memilih pemimpin yang mereka inginkan. Sama halnya dikatakan oleh Imam Besar atau Grand Syeikh Al Azhar Ahmad Muhammad Ath – Thayeb ini juga mengatakan jangan mempolitisasi agama dalam politik. yang mana agama dan politik ini tidak akan menyatukan masyarakat, bahkan isu SARA yang ada pada Pilkada DKI Jakarta ini pun dapat menghilangkan rasa toleransi antar masyarakat yang ada. Beliau pun resah dengan isu – isu yang menyebar saat ini yang didalamnya melibatkan agama sebagai bahan

politik hingga ke Pilkada DKI Jakarta 2017. Agama tidak boleh dijadikan alat untuk berpolitik karena agama sangat sakral dan dengan beredarnya politisasi agama ini sangat membuat resah di kalangan masyarakat hingga toko- tokoh agama. Agama boleh digunakan politik hanya untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat saja, tidak digunakan untuk memecah belah masyarakatnya (liputan6.com, 04 Mei 2018).

Munculnya keterlibatan agama didalam Pilkada DKI Jakarta ini sangat membuat kekhawatiran dan panasnya jalan Pilkada DKI Jakarta 2017, pasalnya isu agama yang dikeluarkan dalam Pilgub DKI hanya untuk memenangkan pertarungan karena salah satu calon gubernur DKI Jakarta memiliki keturunan Tionghoa dan beragama non- Muslim. Salah satu calon tersebut ialah Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang mana saat ia mencalonkan diri ia memiliki masalah yang begitu besar dampaknya terhadap masyarakat dan ia juga diklaim telah menistakan agama yang membuat hati sakit umat Muslim dan para ulama. Dengan beredarnya masalah itu juga membuat panas jalannya Pilkada DKI Jakarta (tirto.id, 14 Februari 2017). Sebanyak 58 persen pemilih Anies-Sandiaga mencoblos berdasarkan kesamaan agama. Pemilih Ahok-Djarot bukannya tak ada yang mencoblos berdasar kesamaan agama. Ada, tapi jumlahnya tak signifikan, hanya 3 persen (tirti.id. 20 April 2017).

Dapat ditarik kesimpulan bahwa, pengaruh keyakinan ini sangat dapat mempengaruhi masyarakat dalam memilih calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2017. Pasalnya pengaruh keyakinan tersebut telah melibatkan agama didalamnya, yang kita ketahui bahwa mayoritas

penduduk Indonesia adalah Muslim. Didalam keyakinan ini pun terdapat keterlibatan Fatwa MUI yang terkait yang terkait larangan untuk tidak memilih pemimpin yang tidak seagama semakin membuat masyarakat resah dan bingung. Bahkan masyarakat juga resah dengan banyaknya spanduk yang tersebar tertuliskan larangan menyolati jenazah yang memiliki perbedaan pandangan politik. pengaruh keyakinan ini juga membuat masyarakat menjadi terpecah belah dan menjadi saling benci terhadap umat yang lainnya.